

**KEGIATAN SIMPAN PINJAM UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN  
DI DESA KELAMANTAN KECAMATAN BENGKALIS  
TAHUN 2016 - 2017**

Irwansyah Putra  
Email : justirwansyah@gmail.com  
Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Secara umum kegiatan simpan pinjam khusus perempuan merupakan salah satu kegiatan dalam bentuk simpan pinjam, yang semua anggotanya adalah perempuan. Kecamatan Bengkalis sebagai Ibukota Kabupaten Bengkalis yang ada di Provinsi Riau juga telah mengikuti kegiatan ini sejak tahun 2011. Ditemukannya 19 kelompok pengguna Simpan Pinjam Perempuan yang menunggak yang diakibatkan usaha mereka macet. Ditemukan bahwa proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha atau sosialisasi dasar belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya modal atau dana yang tersedia di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Bengkalis, yang berdampak dengan banyaknya daftar tunggu kelompok calon peminjam Simpan Pinjam Perempuan yang belum terdandi. Mayoritas kelompok perempuan yang memanfaatkan dana Simpan Pinjam Perempuan tidak sepenuhnya untuk digunakan dalam meningkatkan usaha ekonomi rumah tangga, namun modal usaha yang didapat justru dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Di Desa Kelamantan Kecamatan Bengkalis, dan apa saja faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Di Desa Kelamantan Kecamatan Bengkalis, dan faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan Di Desa Kelamantan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Di Desa Kelamantan Kecamatan Bengkalis Tahun 2016-2017, kurang berjalan dengan baik. Kelemahan dalam pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Di Desa Kelamantan Kecamatan Bengkalis Tahun 2016-2017 terjadi yaitu pada pendampingan yang belum menekankan pada pengembangan usaha dan pemasaran dan jangkauan terhadap rumah tangga miskin relatif masih kecil.

*Kata Kunci : Kegiatan, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan*

**KEGIATAN SIMPAN PINJAM UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN  
DI DESA KELAMANTAN KECAMATAN BENGKALIS  
TAHUN 2016 - 2017**

Irwansyah Putra  
Email : justirwansyah@gmail.com  
Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

*Abstract*

*In general, women's saving and loan activities are one of the activities in the form of savings and loan, which all members are women. Bengkalis Sub-district as the Capital of Bengkalis Regency in Riau Province has also participated in this activity since 2011. The discovery of 19 groups of users of Savings and Loans Women who are delinquent due to their business traffic jam. It was found that the process of meeting the financing needs of the business or the basic socialization has not been fully realized. This is due to the limited capital or funds available in the Kecamatan Activity Management Unit of Bengkalis, which has an impact on the waiting list of the unaffordable group of prospective Savings and Loans borrowers. The majority of female groups who utilize the Women Savings and Loan Fund are not entirely to be used in improving household economic activities, but the business capital obtained is used for activities that are merciful. The problem in this research is how the implementation of Savings and Loans Activities for Women Groups in Kelamantan Village Bengkalis Subdistrict, and what are the factors - obstacles in the implementation. The purpose of this study is to know the implementation of Savings and Loans Activities for Women Groups in Kelamantan Village Bengkalis District, and the factors - obstacles in the implementation.*

*This research approach using qualitative research method. The location of this research was conducted in Kelamantan Village Bengkalis District Bengkalis Regency. Informant research using purposive sampling technique. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. The data obtained will be analyzed by descriptive method using qualitative approach.*

*The results of this study can be concluded that the implementation of Savings and Loans Activities for Women Group in Kelamantan Village Bengkalis District Year 2016-2017, less run well. Weaknesses in the implementation of Savings and Loans Activities for Women Groups in Kelamantan Village Bengkalis Sub-district Year 2016-2017 occurred in the mentoring that has not been emphasized on business development and marketing and coverage of poor households is still relatively small.*

***Keywords: Activity, Save and Borrow Women's Groups***

## A. PENDAHULUAN

Di dalam Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, mulai dari memberikan bantuan langsung ke masyarakat hingga mengadakan kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketika dihadapkan pada kondisi nyata masyarakat Indonesia, alangkah lebih bijak apabila pemerintah dalam usaha menggulangi kemiskinan membidik pada mentalitas masyarakat Indonesia. Indonesia selalu ada dalam bayangan kemiskinan. Hal terpenting dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia yaitu memberikan keterampilan serta kemudahan dalam akses atas modal yang dibutuhkan.

Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok perempuan merupakan salah satu jenis kegiatan PNPM-MPd ini adalah penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Dalam salah satu tujuan khususnya, disebutkan bahwa PNPM mandiri bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu atau perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

Dalam salah satu prinsip dasar PNPM mandiri, juga disebutkan adanya kesetaraan dan keadilan gender, yang berarti masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan kegiatan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. Selain itu salah satu keluaran kegiatan PNPM mandiri ini adalah

adanya peningkatan keterlibatan rumah tangga miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelestarian kegiatan – kegiatan PNPM mandiri itu sendiri.

Berdasarkan tujuan khusus itu, prinsip dasar dan keluaran kegiatan dari PNPM mandiri tersebut dapat dinyatakan bahwa keberpihakan pada perempuan merupakan salah satu nilai tambah dari kegiatan ini. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) ini merupakan salah satu jenis kegiatan yang secara nyata menunjukkan adanya keseriusan dari PNPM mandiri untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Secara umum kegiatan simpan pinjam khusus perempuan merupakan salah satu kegiatan dalam bentuk simpan pinjam, yang semua anggotanya adalah perempuan. Kecamatan Bengkalis sebagai Ibukota Kabupaten Bengkalis yang ada di Provinsi Riau juga telah mengikuti kegiatan ini sejak tahun 2011.

Data kelompok tidak menunggak Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Bengkalis Tahun 2017 adalah sebanyak 25 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Berdasarkan fenomena yang didapat dilapangan, ditemukan beberapa permasalahan yakni :

1. Ditemukannya sebanyak 19 kelompok pengguna Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang menunggak yang diakibatkan usaha mereka macet
2. Ditemukan bahwa proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha atau sosialisasi dasar belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya modal atau dana yang tersedia di Unit

Pengelola Kegiatan Kecamatan Bengkalis, yang berdampak dengan banyaknya daftar tunggu kelompok calon peminjam Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang belum terdani.

3. Mayoritas kelompok perempuan yang memanfaatkan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan tidak sepenuhnya untuk digunakan dalam meningkatkan usaha ekonomi rumah tangga, namun modal usaha yang didapat justru dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif.
4. Mayoritas pengguna kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang terbentuk ditengah masyarakat hanya bersifat dadakan atau dimana kelompok itu terbentuk ketika ada kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sehingga kelembagaan kelompok itu masih sangat rapuh

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan dalam pengelolaan kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan rencana Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih jauh sehingga dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Kecamatan Bengkalis?

## B. KERANGKA TEORI

Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat bisa dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkan. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai *output* yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Untuk mewujudkan suatu tujuan atau suatu target, dibutuhkan adanya pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

**Budi Winarno (2008 : 16)** menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya pejabat, suatu kelompok maupun lembaga pemerintahan ) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan – pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan – pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Menurut **Hanifah Harsono (2002:67)**, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu kegiatan.

**Van Meter dan Van Horn** dalam buku **Budi Winarno (2008: 146 – 147)** mendefinisikan bahwa implementasi Kebijakan sebagai tindakan – tindakan dalam Keputusan – keputusan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan – tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan kecil dan besar yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan

Keberhasilan implementasi menurut **Merilee S. Grindle** dalam buku **AG. Subarsono (2011 : 93)** dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah kegiatan sudah tepat, apakah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah didukung oleh sumber daya yang tepat.

Menurut **Bambang Sunggono (1994 : 149 – 153)**, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

*Pertama*, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan

prioritas, atau kegiatan-kegiatan kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan - kekurangan yang menyangkut sumber daya - sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada penerapannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya

implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan tidaklah efektif.

Kegiatan kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan :

- a. Mobilisasi Tabungan/pinjaman
- b. Memberikan pelayanan kredit untuk pengembangan usaha
- c. Menyelenggarakan pertemuan rutin
- d. Membimbing anggota dalam perencanaan dan pengembangan usaha
- e. Meyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang ada relevansinya dengan usaha yang dijalankan anggota kelompok

pengguna. (Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PTO PNPM – MPD) Tahun 2009).

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan Di Desa Kelamatan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

### D. HASIL PENELITIAN

#### 1. Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Kecamatan Bengkalis Tahun 2016 – 2017

##### a. Mobilisasi Tabungan/Pinjaman

Kegiatan SPP yang merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu kegiatan simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Kelompok SPP adalah kelompok ibu-ibu atau perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.

Jenis kegiatan SPP adalah memberikan tambahan dana modal

kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM MP, mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM MP, yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sasaran dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang sudah ada di masyarakat. Sedangkan bentuk dari kegiatan simpan pinjam ini adalah memberikan dana pinjaman sebagai dana tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana pinjaman. Dana Bantuan Lansung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) per Kecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.

Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam

perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

#### **b. Memberikan Pelayanan Kredit Untuk Pengembangan Usaha**

Penetapan persyaratan pinjaman tertuang dalam surat perjanjian pinjaman yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok, Sekretaris Kelompok, Ketua UPK dan saksi-saksi yaitu Kepala Desa/Lurah dan ketua TPK. Ketua Kelompok dan Sekretaris sesuai fungsinya mendapatkan kuasa dari kelompok untuk mewakili

Perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh pemanfaat kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yakni ibu-ibu atau wanita yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki pekerjaan pokok sebagai penjahit dan ada juga yang mulai berdagang dan kini mereka mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari. pada mata pencaharian yang memiliki waktu luang dapat membuka usaha dagang kecilkecilan setelah mengikuti kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang mana responden ini akan memiliki penghasilan yang sisanya dapat ditabung

Pengembangan dunia usaha daerah yang terdiri dari badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil menengah akan diusahakan semakin mampu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha, dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Untuk itu kemampuan dunia usaha seperti koperasi, usaha kecil menengah, usaha tradisional, sektor informal dan usaha milik daerah, akan

terus ditingkatkan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih tangguh dan mandiri.

Kerjasama yang lebih adil antara koperasi, usaha milik daerah, usaha milik negara, usaha kecil menengah, usaha tradisional dan sektor informal, perlu dikembangkan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendorong kerjasama tersebut dalam kerangka itu terus diefektifkan peranan Kadin daerah Dalam pengembangan dunia usaha daerah harus dihindarkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli dan monopsoni baik secara langsung ataupun tidak langsung yang nyata-nyata merugikan masyarakat.

Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Perempuan merupakan kegiatan yang paling banyak diminati oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga, karna selain suku bunga lebih rendah dari pada bank pada umumnya proses meminjamnya juga tanpa adanya angunan atau jaminan sehingga memudahkan akses pendanaan atau permodalan bagi usaha skala mikro yang akan mereka lakukan, karena pada umumnya kebanyakan dari masyarakat ibu rumah tangga tersebut kesusahan dalam melakukan pinjaman dikarenakan adanya jaminan atau angunan sehingga banyak dari ibu rumah tangga yang tidak memiliki jaminan tidak dapat meminjam uang dibank atau koperasi yang sudah ada.

Pemberian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan haruslah tepat sasaran Karena kegiatan ini adalah kegiatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk memberdayakan

masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada, dengan adanya Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal tambahan untuk meningkatkan usaha yang sudah ada dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memulai usaha baru.

Baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

### **c. Menyelenggarakan Pertemuan Rutin**

Tujuan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan tercapai karena responden mendapatkan pendanaan dengan mudah untuk membantu mengembangkan usaha mereka, tetapi jumlah dana yang diterima masih kurang sesuai dengan keinginan responden, hal ini disebabkan dana yang sedikit menurut mereka hanya memenuhi sebagian penambahan modal usaha yang seharusnya dapat digunakan untuk penambahan jumlah ternak serta yang mereka butuhkan lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa indikator, yaitu antara lain kehadiran dalam rapat, memberi ide atau saran dalam rapat,

bertanya saat rapat, kehadiran dalam pelatihan, bertanya, memberikan ide dan saran saat pelatihan, kehadiran dalam pertemuan rutin bulanan dari UPK dan bertukar informasi antar kelompok SPP lainnya. Partisipasi dalam rapat anggota adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara rutin tiap bulannya. Sedangkan partisipasi dalam pelatihan antara lain pelatihan pembuatan pembukuan keuangan, pembukuan kegiatan, kewirausahaan, dan lain sebagainya.

Dana bergulir berdasarkan buku petunjuk operasional PNPM Mandiri Pedesaan adalah seluruh dana kegiatan dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok – kelompok masyarakat.

Kegiatan simpan pinjam ini memiliki beberapa ketentuan, yaitu; kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun; mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati; telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota; kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik; mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Penetapan persyaratan pinjaman tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut; penentuan jasa pinjaman dengan keentuan besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan

pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap; jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan; jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemamfaat maupun tingkat kelompok; angsuran langsung dari kelompok ke UPK.

#### **d. Membimbing Anggota Dalam Perencanaan dan Pengembangan Usaha**

Dalam pelaksanaan kegiatan kelompok simpan pinjam masing-masing pengurus mempunyai tugas. Ketua bertugas memimpin rapat, memberikan informasi kepada anggota, mewakili kelompok dalam pengurusan proposal pengajuan pinjaman dana ke pihak PNPM Mandiri Pedesaan, dan bertanggungjawab atas semua anggota kelompok. Sekretaris kelompok bertugas mencatat keputusan musyawarah kelompok dan bersama ketua mewakili kelompok untuk mengurus kepentingan kelompok. Sedangkan bendahara kelompok bertugas untuk mencatat, membukukan uang iuran kelompok, pengurusan uang pinjaman dan mengurus keuangan kelompok.

Pengusaha golongan ekonomi lemah dan usaha tradisional akan terus dibina untuk dapat meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran dalam rangka mengembangkan kewiraswastaan, antara lain melalui pendidikan pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis dengan mengikut sertakan usaha besar, usaha milik daerah/nasional. Sejalan dengan itu perlu disediakan berbagai kemudahan dan bantuan seperti kredit permodalan, tempat usaha, bimbingan teknologi

tepat guna, informasi pasar dan lain-lain.

Langkah-langkah untuk membina dan melindungi usaha tradisional agar dapat meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran, terutama usaha rumah tangga yang berakar pada kebudayaan daerah yang ternyata masih lemah namun mempunyai potensi untuk membuka kesempatan kerja dan menampung tenaga kerja. Dimasa datang perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan efisiensi dan pemasarannya sehingga dapat mengikuti perkembangan pasar tanpa meninggalkan ciri-ciri khas tradisionalnya.

Permasalahan yang kerap terjadi yaitu banyaknya tunggakan setoran yang hampir dialami sebagian besar kelompok ibu rumah tangga yang meminjam uang di PNPM Mandiri Pedesaan tersebut hal ini membuat pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Untuk Perempuan tidak dapat berjalan dengan baik.

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam.

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan khusus perempuan yang berkeinginan untuk simpan pinjam. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro,

memenuhi kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan.

Mengetahui kondisi riil calon peminjam dana perguliran. Verifikasi dilakukan dengan cara mengunjungi rumah ketua / atau anggota kelompok dan melakukan wawancara seputar pendapatan dan pengeluaran keluarga untuk mengetahui sejauhmana kelayakan pinjaman yang diajukan oleh anggota kelompok karena di Perguliran PNPM tidak menggunakan jaminan sehingga harus dilakukan dengan cermat dan hati – hati

#### **e. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**

Kegiatan penting dalam kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah lancarnya pengembalian pinjaman anggota kepada kelompok dan kelompok kepada pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Kelancaran pengembalian ini sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan simpan pinjam, karena dana yang telah dikembalikan dapat digulirkan lagi kepada kelompok lainnya.

Tujuan pelatihan manajemen pengelolaan BUM Desa adalah agar pengelola BUM Desa dapat memahami pengelolaan BUM Desa yang baik, memahami kelayakan bisnis, pengalihan potensi Desa dan dapat memahami pelaporan keuangan sesuai aturan agar dikemudian hari tidak menimbulkan persoalan-persoalan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Kegiatan ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara

langsung. Dan dalam kegiatan Pembangunan ini juga mengikut sertakan perempuan dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Salah satu Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan kegiatan Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) yaitu pemberian modal untuk pengembangan usaha. Dengan kondisi semacam ini maka pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan diberbagai wilayah, dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat desa. Sasaran pembangunan terutama kepada mereka yang dikategorikan miskin.

Kegiatan penambahan permodalan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) ini di harapkan akan mampu memberi motivasi terhadap pelaku usaha dalam meningkatkan produktifitasnya, apabila produktifitas meningkat tentu akan menghasilkan pendapatan yang meningkat pula, karena selama ini yang selalu menjadi hambatan dan kendala dalam dan pengembangan usaha adalah modal, selain dari sumber daya insani juga modal juga hal yang menentukan dalam mempercepat pengembangan usaha.

## **2. Hambatan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Kecamatan Bengkalis Tahun 2016 – 2017**

Dalam penelitian pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Kecamatan Bengkalis Tahun 2016-2017, terdapat beberapa hambatan diantaranya :

- a. Kurang lancarnya komunikasi anggota kelompok Simpan Pinjam  
Kesulitan anggota kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

terjadi pada masalah berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia, karena anggota kelompok di Desa Kelamantan Kecamatan Bengkalis rata-rata menggunakan bahasa sehari-hari adalah bahasa Melayu Riau Suku Asli Akit. Sehingga dalam berkomunikasi harus dibantu dari penterjemah lain yang memahami bahasa anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.

- b. Kurangnya Anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Mendapat Pelatihan dalam Penggunaan Dana

Kesulitan anggota kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan juga terjadi karena kurang mendapat pelatihan dari Petugas Pengelola BUM Desa, hanya mendapat pelatihan di awal-awal kegiatan, setelah itu tidak ada pelatihan sama sekali, akibatnya pengembalian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan menjadi macet.

## **E. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Kecamatan Bengkalis Tahun 2016-2017, kurang berjalan dengan baik. Kelemahan dalam pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Kecamatan Bengkalis Tahun 2016-2017 terjadi yaitu pada pendampingan yang belum menekankan pada pengembangan usaha dan pemasaran dan jangkauan terhadap rumah tangga miskin relatif masih kecil.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Kecamatan Bengkalis Tahun 2016-2017, yaitu:
  - a. Kurang lancarnya anggota

Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan dalam berkomunikasi.

- b. Kurangnya Anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Mendapat Pelatihan dalam Penggunaan Dana.

#### **F. SARAN**

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis pengelola Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan, agar supaya sosialisasi yang dilakukan menjangkau semua kaum perempuan atau ibu-ibu agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan.
2. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis agar meningkatkan pendapatan peserta dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan peserta melalui pendampingan, dimana pengelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat memberikan pembinaan dan pelatihan, sehingga dapat lebih mengembangkan usaha ekonomi produktif secara mandiri.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan partisipatif di Kabupaten Bengkalis

Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PTO PNPM – MPD) Tahun 2009.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT.Mutiara Sumber Widya.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika